

GENERASI DAN PENDEKATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

DR. NOVITA TRESIANA



CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. **MEMAHAMI PENDEKATAN DARI 4 GENERASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEMAHAMI GENERASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**
2. **MEMAHAMI 3 PENDEKATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

GENERASI DLM STUDI IMPLEMENTASI

GENERASI I

GENERASI II

GENERASI III

GENERASI IV

GENERASI I

1. **Penelitian generasi pertama, fokus :**
 - a. Bagaimana suatu aturan diwujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program
 - b. Upaya menunjukkan sifat kekomplekan dan dinamika implementasi
 - c. menekankan pentingnya subsistem kebijakan
 - d. Mengidentifikasi faktor yg berhub dg hasil suatu program
 - e. mendiagnosis bbrp penyakit yg sering mengganggu pelaksana

GENERASI II, Fokus :

- 1. Jenis dan isi kebijakan**
- 2. organisasi pelaksana dan sumberdaya**
- 3. pelaksana kebijakan : sikap, motivasi, hub antar pribadi, komunikasi dsb**
- 4. Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yg muncul dsb**

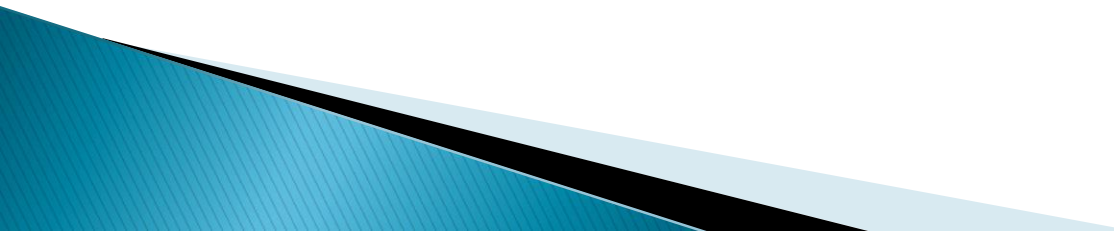
GENERASI III, fokus :

- 1. Komunikasi antar lembaga pemerintahan**
- 2. penyusunan desain penelitian**
- 3. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi**

GENERASI IV, fokus :

1. **Communication Theory**
2. **Region Theory
(Pelaksana/Aktor)**
3. **Kontingensi (faktor–Faktor)**
4. **Policy learning**

PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN



Beberapa model Implementasi (Parsons, 1997)

MODEL ANALISIS KEGAGALAN ,
(implementasi sbg proses interaksi
antara tujuan dan tindakan(Pressman &
Wildavsky, 1973), implementasi sebagai
politik adaptasi saling menguntungkan (Mc Laughin, 1975)

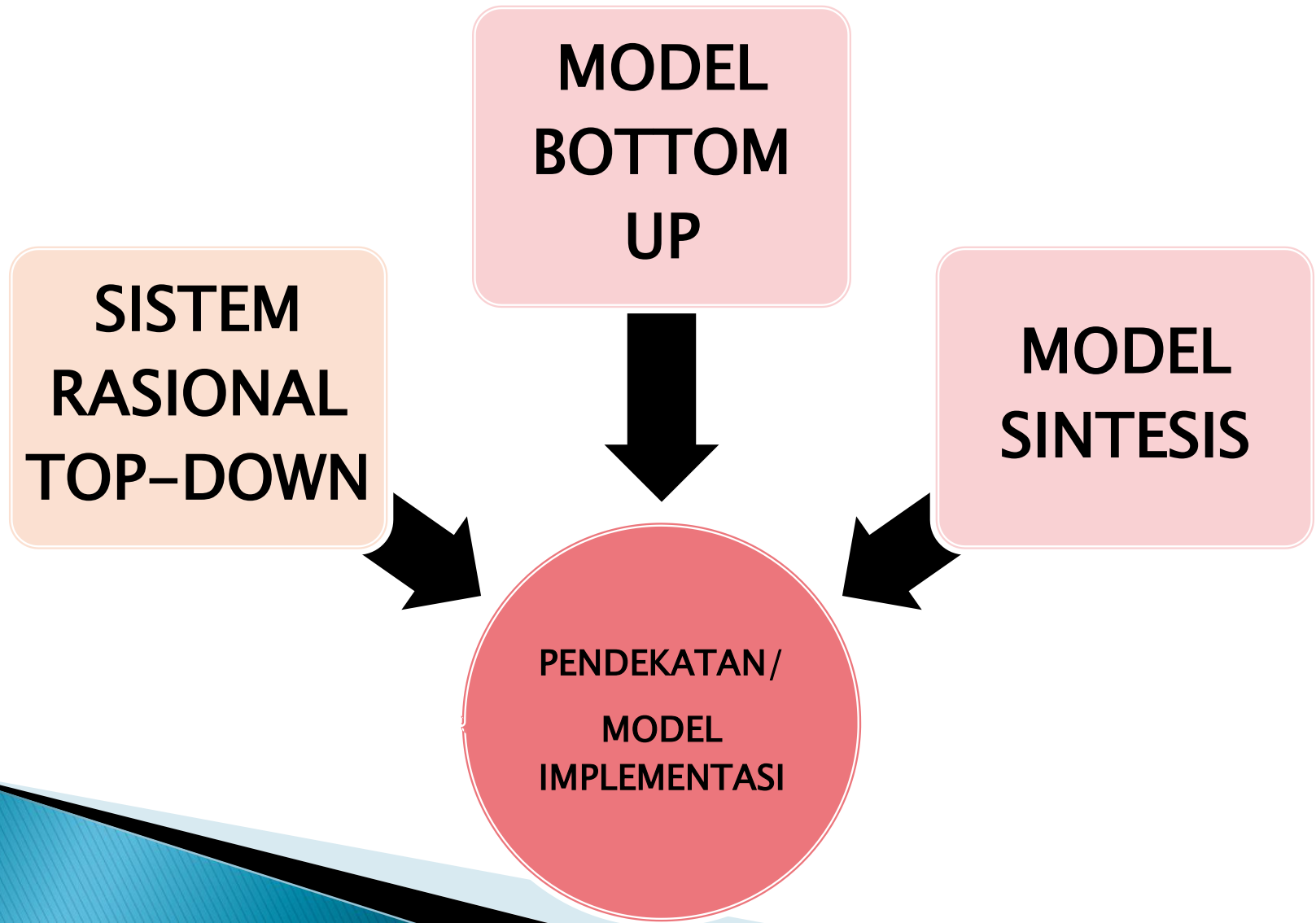
MODEL TOP DOWN : mengidentifikasi
faktor yang menyebabkan keberhasilan
implementasi (Van Meter van Hoirn
(1975), Grindle (1980), Sabatier &
Mazmanian (1979) dsb

MODEL IMPLEMENTASI

MODEL BOTTOM UP : mengidentifikasi
faktor lain dan interaksi organisasi
antara Pemerintah dg warga negara
(lipsky, 1971), Implementasi sebagai
proses yg disusun melalui konflik dan
bergaining (Wetherly, 1977),
Implementasi sebagai proses alur (Smith,
1973)

MODEL SINTESIS : Ripley & Franklin
(1985), Nakamura & Smallwood
(1986) dsb

PENDEKATAN DLM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN



PENDEKATAN TOP-DOWN

- ❑ MENJADIKAN ORG MELAKUKAN APA-APA YG SUDAH DIPERINTAHKAN
- ❑ MENGONTROL URUTAN TAHAPAN DALM SISTEM
- ❑ PENGEMBANGAN PROGRAM KONTROL YG MEMINIMALKAN KONFLIK DAN DEVIASI DR TUJUAN YG DITETAPKAN

MODEL IMPLEMENTASI TOP-DOWN

**LOGIKA BERFIKIR DARI ATAS (PIMPINAN-
BAWAHAN/KEBIJAKAN-PELAKSANAAN LAPANG)**

**COMMAND AND CONTROL : PIMPINAN
MENERJEMAHKAN&MENGAWASI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DI LAPANGAN :
SESUAI DENGAN COMMAND (PERINTAH)**

PEMBUAT KEBIJAKAN

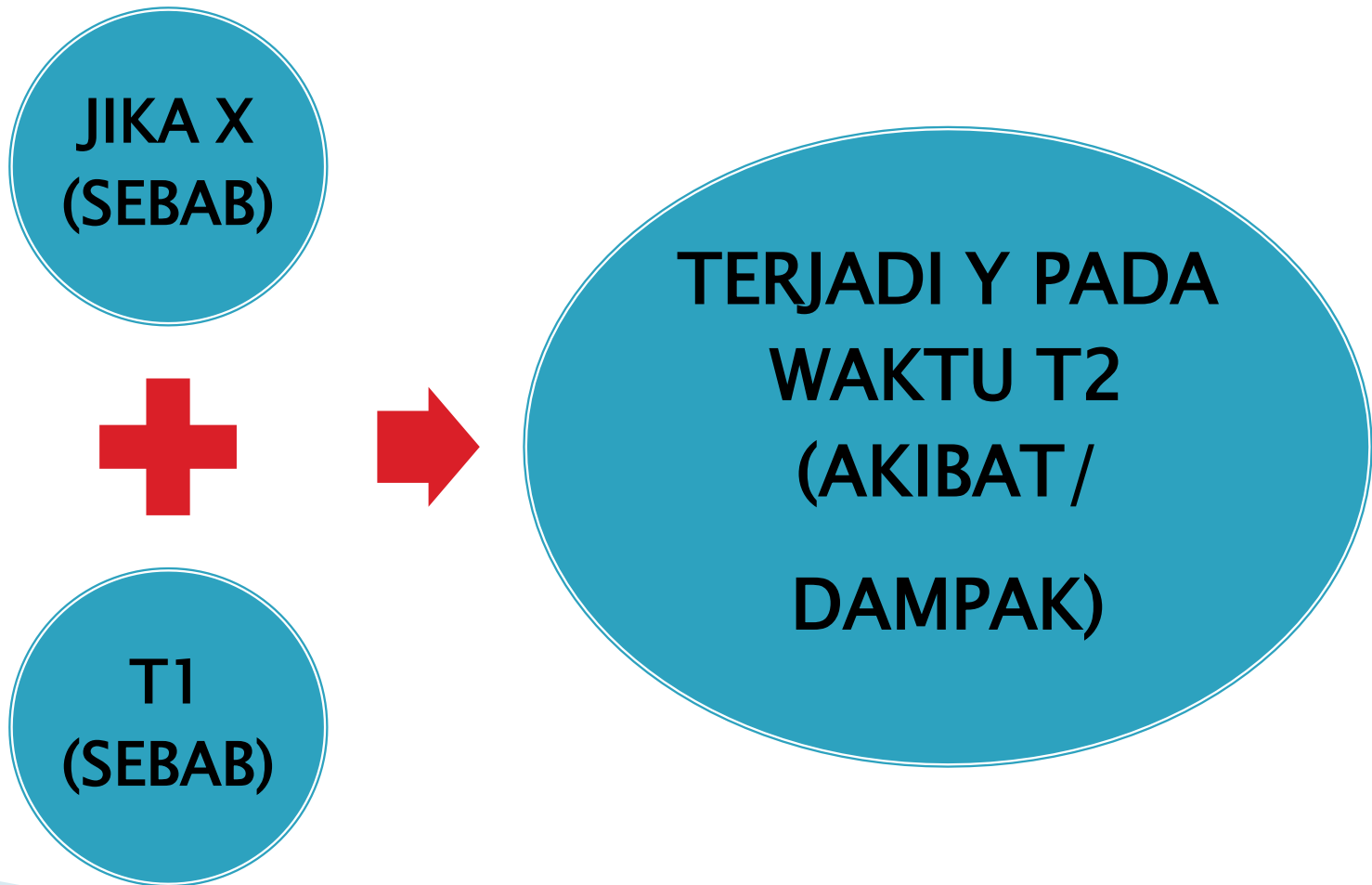
```
graph TD; A[PEMBUAT KEBIJAKAN] --> B[PELAKSANA KEBIJAKAN]; B --> C[PELAKSANA KEBIJAKAN GARDA DEPAN]; C --> D[KELOMPOK SASARAN/PENERIMA PERUBAHAN/TARGET KEPUTUSAN];
```

PELAKSANA KEBIJAKAN

**PELAKSANA KEBIJAKAN
GARDA DEPAN**

**KELOMPOK SASARAN/PENERIMA
PERUBAHAN/TARGET KEPUTUSAN**

PENDEKATAN SISTEM RASIONAL TOP-DOWN



PRASYARAT/HIPOTESIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI TOP DOWN

**KEBIJAKAN (UU/PROGRAM)
DAN TUJUAN TELAH
DIDIFINISIKAN DGN BAIK**

**IMPLEMENTASI IDEAL ADL
PRODUK ORGANISASI YG PADU
SPT MILITER, DGN GARIS
OTORITAS YG TEGAS (UTK
KONTROL YG BAIK)**

**NORMA-NORMA AKAN DITEGAKKAN
BAHWA ORG AKAN MELAKSANAKAN
APA YG DIMINTA DAN
DIPERINTAHKAN (PEMAHAN AKAN
TUJUAN DAN KEPATUHAN PADA
ATURAN))**

**ADA BANYAK DUKUNGAN DAN
BANYAK SUMBER 9DUKUNGAN
BERBAGAI SUMBERDAYA**

**HARUS ADA KOMUNIKASI YG SEMPURNA DIDLM
DAN DIANTARA ORGANISASI (KOMUNIKASI DAN
MONITORING UTK KONTROL
INDIVIDU&ORGANISASI YG TERLIBAT)**

KEGIATAN PENELITIAN IMPLEMENTASI TOP-DOWN

- ❑ Memilih kebijakan yang akan di kaji
- ❑ Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan
- ❑ Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk capai tujuan dan sasaran kebijakan

LANJUTAN

- ❑ Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai SOP yang ada)
- ❑ Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.

LANJUTAN

- ❑ Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.
- ❑ Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

DIMENSI PENYEBAB KEGAGALAN IMPLEMENTASI RASIONAL TOP DOWN :

DIMENSI-DIMENSI KEGAGALAN

FAKTOR PEMILIHAN STRATEGI YG
KELIRU/MESIN INSTRUMEN YG KELIRU

PEMROGRAMAN BIROKRASINYA YG
SALAH

OPERASIONALISASINYA YG BURUK

ADA YG SALAH PADA TINGKAT
PELAKSANA/RESPON BURUK THD PROBLEMA

KRITIK TOP DOWN

PERTAMA :

aktor utama yang paling berpengaruh dalam implementasi adalah **policy maker**, sehingga mereka lupa bawa keberhasilan dan kegagalan implementasi dapat dipengaruhi oleh aktor-aktor lain, yaitu birokrat garda depan, kelompok sasaran, sector swasta dan lain-lain.

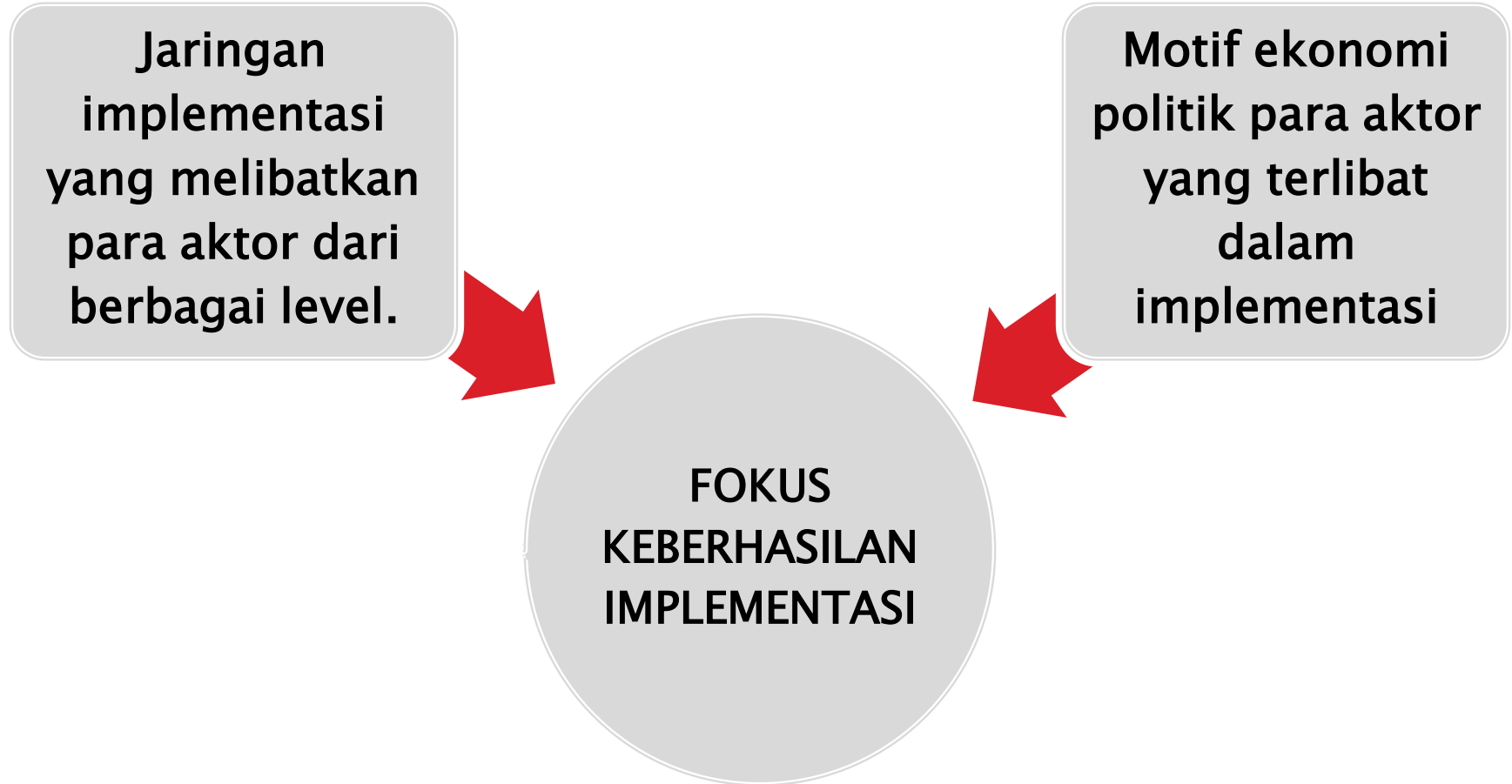
KEDUA :

Pendekatan top down sulit diterapkan ketika tidak ada kebijakan/aktor yang dominan (kebijakan melibatkan pemerintah, swasta dan internasional, contoh program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Erupsi Merapi).

KETIGA :

- ▶ Pendekatan top down melupakan kenyataan bahwa birokrat garda depan dan kelompok sasaran cenderung untuk menyelewengkan arah kebijakan bagi kepentingan masing-masing.

PENDEKATAN BOTTOM UP



2 ASPEK PENTING DLM IMPLEMENTASI BOTTOM UP

Birokrat pada level bawah (street level bureaucrat)

- POSISI KUNCI DLM IMPLEMENTASI
- MEREALISASIKAN POLICY OUTPUT PADA KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran (target group).

- KETERLIBATAN DLM PERUMUSAN
- KETERLIBATAN DLM PELAKSANAAN

Kapan digunakan model top down & bottom up ?

- ▶ Model top down akan menguntungkan pada sebuah situasi dimana para pembuat kebijakan mampu mengatur dan mengontrol situasi, dan dana yg terbatas
- ▶ Model Bottom up, menguntungkan pada situasi dimana implementator mempunyai kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa ada dependensi kekuasaan dengan melihat dinamika daerah atau lingkungan kebijakan yg berbeda
- ▶ Menurut Eric Lane (1995) model topdown menekankan tanggung jawab, sementara bottom up menekankan pada kepercayaan

PENDEKATAN DEMOCRATIC (GOVERNANCE) DLM IMPLEMENTASI

PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM

2 TAHAP PENILAIAN KINERJA IMPLEMENTASI

- 1) MENILAI KEBERHASILAN PARTISIPASI
MASYARAKAT**
- 2) APAKAH PROGRAM YANG DIRANCANG
DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN BENAR
SEHINGGA TERCAPAI TUJUAN**

Pendekatan dalam studi implementasi :

1. **Pendekatan struktural** (peran organisasi)
2. **Pendekatan prosedural dan manajemen** (Misal : Network planning and Controll/ NPC, Program Evaluation and Review Tehnique / PERT dsb)
3. **Pendekatan Perilaku** (komunikasi, informasi, sikap dsb)
4. **Pendekatan politis** (aspek-aspek antar departemental/ politik)